

Keberlanjutan Program Pengelolaan Hutan Rakyat di Wilayah UPT KPHP Dolago Tanggunung

OPEN ACCESS

Sustainability of the Forest Village Community Management Program in UPT KPHP Dolago Tanggunung

Edited by
Shahabuddin Saleh
Nur Edy

Imam Wahid Kurniawan¹, Syukur Umar², Naharuddin²

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pertanian Pascasarjana
Universitas Tadulako

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Pertanian Pascasarjana
Universitas Tadulako

*Correspondence

Imam Wahid Kurniawan
imamwahidkurniawanforester@gmail.com

Received
07/07/2021
Accepted
03/09/2021
Published
30/09/2021

Citation
Imam Wahid Kurniawan (2021)
Sustainability of the Forest
Village Community
Management Program in UPT
KPHP Dolago Tanggunung.
Mitra Sains

Abstract

The Indonesian government continuously strives to increase the forest resources which continue to be the problem is managing community around forests. It is due to weaknesses in management of the forest area, to facilitate it is needed an institution that can manage the forest areas sustainably. Through KPH, forest management is getting better and sustainable. The aim of this research is to analyze the sustainability of the forest village community management program. This research was conducted for three months from June to August 2020 in Petimbe village and Sigimpu village, Palolo district, Sigi regency. The samples in this research were 58 respondents obtained by purposive sampling method. The data analysis method was descriptive analysis. The result shows that the sustainability of the forest village community management program obtains in to 3 dimensions (a) management planning dimension with the value of 180.89 in medium category, (b) The social community dimensions with the value of 197 in moderate category, (c) implementing management activities with the value of 127.6 in the low category.

Key words: Sustainability, Forest Management, Community Forest.

Pendahuluan

Pengelolaan hutan rakyat yang terintegrasi dalam pembangunan kehutanan merupakan strategi terpenting untuk menangani masalah potensi hutan negara yang semakin menurun dan terwujudnya pengelolaan hutan rakyat yang lebih baik secara berkelanjutan (Sukwika et al., 2018). Fenomena keberlanjutan pengelolaan hutan tentu akan sangat berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada disekitar hutan, dengan memperhatikan beberapa faktor yang menunjang kegiatan baik seperti teknis, sosial, maupun ekonomi, diharapkan nantinya akan mampu memberikan dampak yang lebih optimal untuk keberlanjutan hutan rakyat (Asyari & Dewi, 2018).

Hutan Rakyat di Desa Petimbe dan Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Program Pemerintah KPHP Dolago Tanggunung yang bertujuan merehabilitasi lahan. Pemerintah melaksanakan kegiatan pengelolaan rehabilitasi seluas 50,90 Ha di Desa Petimbe dan 54,38 Ha di Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Manfaat yang bisa diperoleh dari pengelolaan hutan rakyat antara lain pemenuhan kebutuhan kayu, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan produktivitas lahan milik masyarakat (Umar et al, 2018).

Hutan rakyat di Desa Petimbe dan Desa Sigimpu memiliki potensi besar dalam hasil hutan kayu dan non kayu dengan sistem agroforestri yang ternyata mampu bermanfaat untuk rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, serta memegang peranan yang sangat penting dalam upaya kegiatan pengelolaan dan pengembangan hutan rakyat. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis

keberlanjutan (*sustainability*) pengelolaan program pada hutan rakyat.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 di Desa Petimbe dan Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Metode pengamatan langsung yaitu kunjungan lapangan bertujuan untuk mengetahui secara langsung lingkungan fisik, dan sosial budaya serta data yang diperlukan dalam penguatan analisis penelitian (Fazriyas et al., 2018).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau data dari narasumber (Responden) sejumlah 58 responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah key informant atau informasi kunci yang dapat memberikan penjelasan yang dikaji (Cryf, 2018). Informan tersebut antara lain adalah kelompok tani hutan (KTH), sedangkan untuk data tambahan dan konfirmasi dilakukan wawancara kepada pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dolago Tanggunung.

1. Kriteria dan Indikator Dimensi Perencanaan Pengelolaan

Pada dimensi perencanaan pengelolaan untuk menganalisis keberlanjutan program hutan rakyat terdapat 2 jumlah kriteria dan 9 indikator dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Pertanyaan Dimensi Perencanaan Pengelolaan

Kriteria Pertanyaan	Tingkat Keberlanjutan Pengelolaan		
	Buruk	Sedang	Baik
Pengelolaan Secara Partisipatif			
Pengelolaan Berdasarkan Hukum Positif maupun Adat			
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Secara Jelas			
Alokasi dan Tahapan-tahapan Waktu Implementasi			
Pembersihan Lahan dan Pemasangan Ajir			
Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman			
Distribusi Bibit dan Penanaman			
Penyiangan dan Penyulaman			
Perlindungan dan Pengamanan Hutan			
Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran Hutan			
Pencegahan dan Perlindungan Hama dan Penyakit			

Sumber : Kesatuan Pengelolaan Hutan, (2017)

2. Kriteria dan Indikator Dimensi Sosial Masyarakat. Pada dimensi sosial masyarakat untuk menganalisis keberlanjutan program hutan rakyat terdapat 3 jumlah kriteria dan 8 indikator dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Pertanyaan Dimensi Sosial Masyarakat

Kriteria Pertanyaan	Tingkat Keberlanjutan Pengelolaan		
	Buruk	Sedang	Baik
Persyaratan Umum atau Legalitas			
Memiliki Status Legal			
Memiliki Organisasi			
Apresiasi Atas Hak Pemanfaatan Hutan Rakyat			
Batas Antara Kawasan Yang Jelas			
Akses dan Kontrol Penuh Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu			
Kontribusi Terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana			
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan			
Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pemerintah Terkait			
Sosialiasi dan Pelatihan Penyakit			
Praktek Budidaya Lokal dan Pelestarian Secara Tradisional			

3. Kriteria dan Indikator Implementasi Aktivitas Pengelolaan Pada dimensi implementasi aktivitas pengelolaan akan ditindak lanjuti pada pengelolaan program yang di implementasikan dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat dapat dilihat dari kriteria dan indikator pada tabel 1.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (descriptive research) dengan pemilihan responden secara *purposive sampling* (Informan Kunci), untuk mengukur keberlanjutan program pengelolaan hutan rakyat di wilayah UPT KPHP Dolago Tanggunung, dilakukan indikator dan kriteria yang digunakan untuk menganalisis keberlanjutan program pada dimensi perencanaan pengelolaan, dimensi sosial

masyarakat dan dimensi implementasi aktivitas pengelolaan.

Untuk melakukan penskalaan pada metode ini setiap informan akan diminta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang telah dibuat peneliti, dari distribusi jawaban responden pada kuisioner, maka dapat disimpulkan sejauh mana keberlanjutan program pengelolaan hutan rakyat. Selain itu ditentukan skor atau bobot nilai dari masing-masing jawaban sesuai dengan kategori jawaban (Tabel 3).

Tabel 3. Nilai Skoring Untuk Setiap Dimensi

No	Tingkat Keberlanjutan	Frekuensi (F _i)	Skor (S _i)	(F _i S _i)	Nilai Kategori
1.	Baik		5		
2.	Sedang		3		
3.	Rendah		1		
Jumlah					

Sumber. Silaen et al., (2013). Modifikasi Skala Likert

Nilai interval setiap ukuran menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jarak Interval (i)Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kelas Interval}}$$

Dimana :

Skor Tertinggi = Jumlah Responden x 5

Skor Terendah = Jumlah Responden x 1

Jumlah Kelas Interval = 3 Kategori Jawaban

Tabel 4. Nilai Interval Keberlanjutan Pengelolaan

Tingkat Keberlanjutan Program Pengelolaan Hutan Rakyat	Nilai Interval
Baik	212 – 289
Sedang	135 – 211
Buruk	58 – 134

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Pengelolaan Hutan Tanaman Kemiri Rakyat

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemiri rakyat telah dilakukan oleh masyarakat

secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun di Desa Petimbe dengan luasan ± 50,90 Ha dan Desa Sigimpu ± 54,38 Ha,. Pengelolaan hutan rakyat dilakukan kerjasama antara kelompok tani hutan dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dolago Tanggunung.

Beberapa Program dilaksanakan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Dolago Tanggunung Provinsi Sulawesi Tengah bermanfaat untuk masyarakat sehingga dapat Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemiri (*Aleurites moluccana* L) dipilih sebagai tanaman utama para petani anggota kelompok tani hutan karena dapat menghasilkan dalam waktu relatif singkat. Selain itu, mudah perawatan dan pemasaran, dari mulai tanam hingga panen dan menghasilkan produksi biji kemiri yang maksimal, sehingga tidak terfokus pada hasil kayu tetapi hasil hutan bukan kayu (Biji kemiri) juga dapat dipanen oleh masyarakat atau para petani kelompok tani hutan. Semakin meningkatnya kebutuhan konsumsi kemiri. Saluran pemasaran petani menjual biji kemiri kepada pedagang pengumpul kecil

maupun pengumpul besar yang ada di Desa Petimbe dan Desa Sigimpu dengan harga Rp. 6.000/Kg.

Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Program Pada Hutan Rakyat

Tinggi-rendahnya tingkat keberhasilan dalam pengelolaan program hutan rakyat merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap optimalisasi peran hutan rakyat dalam kehidupan masyarakat. Analisis keberlanjutan program pada hutan rakyat dapat dilihat sebagai berikut :

Dimensi Perencanaan Pengelolaan

Rencana kerja atau program kelompok tani hutan merupakan program yang berasal dari pemerintah dan dilaksanakan oleh kelompok tani hutan. Anggota kelompok ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan program. Oleh karena itu, anggota kelompok tani hutan Desa Petimbe dan Desa Sigimpu dalam pembuatan rencana kerja atau program dalam pengelolaan hutan rakyat.

Tabel 5. Deskripsi Dimensi Perencanaan Pengelolaan

Kriteria	Tingkat Keberlanjutan Pengelolaan			Nilai Kategori
	Buruk (1)	Sedang (3)	Baik (5)	
Perencanaan Pengelolaan Secara Partisipatif				
✓ Perencanaan Pengelolaan Berdasarkan Hukum Positif maupun Adat	23	18	17	162
✓ Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Secara Jelas	28	10	20	158
✓ Rencana Alokasi dan Tahapan-tahapan Waktu Implementasi	15	17	26	196
✓ Rencana Pembersihan Lahan dan Pemasangan Ajir	8	22	28	214
✓ Rencana Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman	13	28	17	182
✓ Rencana Distribusi Bibit dan Penanaman	18	23	17	172
✓ Rencana Penyiangan dan Penyulaman	16	14	28	198
Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan				
✓ Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran Hutan	22	13	23	176
✓ Pencegahan dan Perlindungan Hama dan Penyakit	17	26	15	170
Total				1628
Rata-Rata				180,89
Kategori				Sedang

Keterangan : Rendah (58-134), Sedang (135-211), Baik (212-289)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa dalam perencanaan pengelolaan pada program yang dilakukan oleh KPH Dolago Tanggung termasuk dalam ketegori sedang dengan rata-rata nilai kategori 180,89. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik

hutan rakyat sudah mengetahui namun belum memahami dengan baik tentang perencanaan dan pentingnya perencanaan.

Oleh karena itu, diperlukan partisipasi maksimal dari semua pihak pada setiap kegiatan, baik pemerintah yang terkait

maupun masyarakat dengan menetapkan tujuan yang mengacu pada juknis surat perjanjian kerjasama swakelola (SPKS) pada kedua Desa tersebut. Sejalan dengan pendapat Supangat et al., (2020) bahwa masyarakat petani (pemilik atau penggarap) lahan ialah pihak yang paling mengetahui kondisi lahan budidaya mereka, dan yang paling berhak menentukan pola pengelolaan yang akan dilakukan. Selain keterlibatan pemerintah dibutuhkan oleh kelompok tani hutan dalam memenuhi sarana dan prasarana serta bantuan bibit dalam pengelolaan tanaman kemiri rakyat yang berada di Desa masing-masing.

Dimensi Sosial Masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan berbagai anggota kelompok tani hutan diperoleh data bahwa masyarakat desa dengan membentuk kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan Desa Petimbe dan Desa Sigimpu dalam pengelolaan tanaman kemiri dan dibantu oleh KPHP Dolago Tanggung dalam mengelola program hutan rakyat di desa masing-masing. adapun hasil dari olahan data yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 6. Dimensi Sosial Masyarakat

Kriteria	Tingkat Keberlanjutan Pengelolaan			Nilai Kategori
	Buruk (1)	Sedang (3)	Baik (5)	
Persyaratan Umum atau Legalitas				
✓ Memiliki Status Legal	11	28	19	190
✓ Memiki Organisasi	6	18	34	230
Apresiasi Atas Hak Pemanfaatan Hutan Rakyat				
✓ Batas Antara Kawasan Yang Jelas	18	22	18	174
✓ Akses dan Kontrol Penuh Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	8	20	30	218
✓ Kontribusi Terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana	24	16	18	162
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan				
✓ Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pemerintah Terkait	12	21	25	200
✓ Sosialisasi dan Pelatihan	14	15	29	204
✓ Praktek Budidaya Lokal dan Pelestarian Secara Tradisional	10	26	22	198
Total				1576
Rata-Rata				197
Kategori				Sedang

Keterangan : Rendah (58-134), Sedang (135-211), Baik (212-289)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tingkat keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat pada dimensi sosial masyarakat di Desa Petimbe dan Desa Sigimpu berdasarkan skoring diperoleh nilai rata-rata sebesar 197 dengan ketegori sedang. Program dilaksanakan berdasarkan azas pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya

hutan. Program ini merupakan salah satu alterfnatif yang dapat dilakukan dalam mengurangi alih fungsi kawasan hutan dan mengurangi bencana alam yang dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan berkelanjutan.

Kamaluddin & Tamrin, (2019) berpendapat bahwa pemberdayaan

masyarakat menjadi perhatian publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi terutama kemiskinan, yang dilaksanakan oleh berbagai elemen mulai dari pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan.

Dimensi Implementasi Aktivitas Pengelolaan

Kegiatan program yang dilakukan pemerintah terkait UPTD KPHP Dolago Tanggunung pada pengelolaan hutan rakyat sebagai berikut

Tabel 7. Dimensi Implementasi Aktivitas Pengelolaan

Kriteria	Tingkat Keberlanjutan Pengelolaan			Nilai Kategori
	Buruk (1)	Sedang (3)	Baik (5)	
Implementasi Pengelolaan Secara Partisipatif				
✓ Implementasi Pengelolaan Berdasarkan Hukum Positif maupun Adat	24	24	10	146
✓ Implementasi Pengelolaan Hutan Jangka Panjang	38	14	6	110
✓ Implementasi Alokasi dan Tahapan-tahapan Waktu Implementasi	30	20	8	130
✓ Implementasi Pembersihan Lahan dan Pemasangan Ajir	26	24	8	138
✓ Implementasi Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman	25	21	12	148
✓ Implementasi Distribusi Bibit dan Penanaman	27	17	14	148
✓ Implementasi Penyiangan, pendangiran dan Penyulaman	34	18	6	118
Implementasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan				
✓ Implementasi Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran Hutan	42	11	5	100
✓ Implementasi Pencegahan dan Perlindungan Hama dan Penyakit	39	12	7	110
Total				1148
Rata-Rata				127,6
Kategori				Buruk

Keterangan : Rendah (58-134), Sedang (135-211), Baik (212-289)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26 Tahun 2005 tentang pedoman pemanfaatan hutan tanaman rakyat/hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan rakyat/hak dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan (Departemen Kehutanan, 2005 dalam anggriani et al., 2019).

Perolahan hasil analisis pengolahan data bahwa dalam tabel 7. menunjukkan rata-rata nilai kategori 127,6 maka dapat dilakukan penafsiran bahawa implementasi aktivitas pengelolaan tanaman kemiri rakyat berada pada kategori tidak memuaskan (rendah). Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada responden (kelompok tani hutan) yang mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan tata kelola tanaman

kemiri rakyat mengalami permasalahan dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan waktu yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan program yang dilakukan hutan belum tercapai secara maksimal.

Implementasi aktivitas pengelolaan program tidak sesuai perencanaan yang dilakukan KPHP Dolago Tanggunung karena tidak dilanjutkan dengan tindakan pendukung yang menunjang keberhasilan dari perencanaan tersebut maka keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat partisipasi masyarakat dan pendampingan yang dilakukan pemerintah terkait yaitu KPHP Dolago Tanggunung setiap tahapan kegiatan program dalam implementasi pelaksanaan program. Respon masyarakat dalam tahap kegiatan berdasarkan hukum positif ataupun adat pemerintah sukses disebabkan karena masyarakat atau kelompok tani hutan ikut berpartisipasi dengan kategori sedang dengan nilai kategori 146. Sedangkan implementasi hutan jangka panjang Sebagian 38 responden (65,52%) mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan masih sangat rendah dengan nilai kategori 110 karena hutan rakyat yang terletak pada areal-areal yang kritis (sempadan sungai, puncak gunung, mata air dan jurang) membutuhkan waktu yang lama.

Alokasi dan tahapan-tahapan waktu pelaksanaan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu KPH Dolago Tanggunung berdasarkan juknis surat perjanjian kerjasama swakelola (SPKS) pada pembersihan lahan dan pemasangan Ajir dengan hasil analisis kategori sedang dengan nilai kategori 138, sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa kegiatan program pada pembersihan lahan dan pemasangan ajir telah dilakukan seperti pembersihan lahan atau lokasi dilakukan untuk membebaskan jalur tanaman dari semak belukar, alang-alang dan tumbuhan pengganggu lainnya. pembuatan jalur tanam dan pemasangan ajir dilakukan sesuai jarak tanam yakni 7m x 7m (200 batang/hektar).

Kegiatan pelaksanaan program pada pembuatan piringan dan lubang tanam termasuk dalam kategori sedang dengan nilai kategori 148. Hasil wawancara menunjukkan bahwa teknik piringan merupakan teknik pembersihan lahan yang paling banyak digunakan oleh petani hutan

rakyat. Pembersihan lahan dengan dengan teknik piringan dipilih pada lahan yang akan ditanami banyak terdapat singkapan batu. sedangkan pembuatan lubang tanam yang dimaksud ialah lubang tanaman yang dibuat pada setiap ajir tanaman, ukuran lubang tanaman bervariasi dengan rata-rata ukuran 30 cm x 30 cm dan kedalam 17 – 20 cm. kegiatan pembuatan piringan dan lubang tanam perlu dilakukan karena masyarakat menyadari kegiatan ini penting karena memudahkan penanaman yang akan dilaksanakan sehingga berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang telah dikeluarkan pada program rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Petimbe dan Desa Sigimpu.

Hasil akhir kegiatan fisik dilapangan pada program rehabilitasi seperti penanaman tanaman pada lubang tanam dengan memperhatikan curah hujan dengan diawali pengangkutan bibit (distribusi bibit) dan penyebaran pada masing-masing lubang tanam. Teridentifikasi dari hasil wawancara dimana informan memperoleh bibit tanaman kemiri yaitu melalui bantuan pemerintah dan pembibitan sendiri. Perolehan pengolahan data berdasarkan analisis ialah bahwa kegiatan program pada distribusi bibit dan penanaman dengan kategori sedang dengan nilai kategori 148. Pola tanam hutan rakyat di kedua desa secara keseluruhan dari hasil pengelolaan hutan rakyat oleh petani (kelompok tani hutan) lebih mengarah kepada sistem agroforestri tapi tidak menanam searah barisan namun ciri khas hutan tetap menonjol yakni masih banyaknya tanaman kehutanan.

Berdasarkan hasil wawancara dari kelompok tani hutan di Desa Petimbe dan Desa Sigimpu bahwa dalam pelaksanaan program pada pengangkutan bibit (distribusi bibit) oleh pemerintah (KPH Dolago Tanggunung) mengalami kendala disebabkan kurangnya informasi dan koordinasi instansi terkait kepada kelompok tani hutan sehingga bantuan distribusi bibit dari pemerintah ketempat lokasi penanaman mengalami keterlambatan dan jumlah bibit yang diangkut tidak sesuai surat perjanjian kerjasama swakelola (SPKS) dengan jumlah total bibit sebanyak 10.000 batang.

Kegiatan penyiangan, pendangiran dan penyulaman merupakan kegiatan

pemeliharaan yang dilakukan pada KPH Dolago Tanggunung dalam program rehabilitasi lahan. pemeliharaan sebahagian responden tidak melakukan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan termaksud dalam kategori rendah (buruk) dengan nilai kategori 118, sebagian besar pemilik hutan rakyat tidak melakukan kegiatan program ini, dari 58 responden ada 34 responden (58,68%) mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam kategori buruk dan hanya 6 responden (10,34%) mengatakan baik. Penyiangan dan pendangiran dilakukan untuk membebaskan tanaman dari jenis-jenis tanaman pengganggu (rumput liar). Selanjutnya, pemeliharaan yang dilakukan oleh kelompok tani hutan berupa tanaman mati tidak ada penyulaman kembali atau penggantian tanaman yang diberikan oleh pemerintah terkait yaitu KPH Dolago Tanggunung tetapi masyarakat (kelompok tani hutan) tetap membersihkan tanaman yang masih hidup dan melakukan penyulaman.

Kegiatan ini pemerintah tidak menerapkan surat perjanjian kerjasama swakelola (SPKS) program yang akan dilaksanakan. Sehingga, adapun hasil responden yang diwawancarai di Desa Petimbe dan Desa Sigimpu mengatakan rendah (buruk) dengan nilai kategori 100, dari 58 responden ada 42 responden (72,41%) dengan kategori buruk, informan mengatakan bahwa kegiatan tidak dilakukan pemerintah dan hanya 5 responden (8,62%) mengatakan baik. Informan yang diwawancarai juga mengetahui tentang pengendalian kebakaran hutan tersebut, namun petani (kelompok tani hutan) tidak pernah mengetahui tentang adanya kegiatan penyulaman, pelatihan dari pihak terkait yang berhubungan dengan kebakaran hutan. Sejalan dengan pendapat Rachmawati dan Susilawi, (2012) bahwa Kegiatan penyulaman ini sangat penting bagi responden karena berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kebakaran hutan, peningkatan kemampuan dan fasilitas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Pemeliharaan Selanjutnya ialah pencegahan dan perlindungan hama dan

penyakit. Kegiatan program yang dilakukan pemerintah tidak menerapkan pada surat perjanjian kerjasama swakelola (SPKS) program yang akan dilaksanakan. Sehingga, adapun hasil responden yang diwawancarai di Desa Petimbe dan Desa Sigimpu, informan mengatakan bahwa kegiatan ini tidak terlaksana dengan kategori rendah (buruk) dengan nilai kategori 110, dari 58 responden ada 39 responden (67,24%) dengan kategori buruk, informan mengatakan bahwa kegiatan tidak dilakukan pemerintah dan Hanya sedikit pemilik hutan rakyat yang sering melakukan pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman kehutanannya yaitu 7 responden (12,07%) mengatakan baik. Menjadi perhatian khusus kepada pemerintah bahwa dalam kegiatan program rehabilitasi yang akan dilaksanakan perlu adanya pencegahan dan perlindungan hama dan penyakit dengan memberikan bimbingan atau pelatihan khusus pada petani (kelompok tani hutan) dalam pengelolaan hutan rakyat. Sejalan dengan penelitian Pratama et al., (2015) mengatakan bahwa disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hama dan penyakit tanaman khususnya tanaman kehutan serta bagaimana cara pemberantasannya sehingga, banyak pemilik hutan rakyat yang hanya membiarkannya saja tanpa ada usaha pengendalian apapun.

Selanjutnya, bahwa dalam kegiatan program rehabilitasi tentunya sangat diperlukan pengarahan dan bimbingan serta pengawasan yang dilakukan dinas terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi. hal ini dilakukan demi berjalannya program hutan rakyat dengan hasil yang diharapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberlanjutan program pengelolaan hutan rakyat tanaman kemiri didapatkan hasil pada dimensi perencanaan pengelolaan program hutan rakyat dengan rata-rata nilai sebesar 180,89 kategori (Sedang). Dimensi sosial masyarakat

dengan rata-rata nilai sebesar 197 kategori (Sedang). Dimensi implementasi aktivitas pengelolaan dengan rata-rata nilai sebesar 127,6 kategori (rendah). Adapun faktor pendorong sebagian besar berasal dari masyarakat sebagai pemilik lahan. Oleh karena itu, motivasi masyarakat, baik ekonomi maupun ekologi, perlu dipelihara dan dikembangkan agar tetap mempertahankan keberadaan kawasan hutan rakyat. Selain pembinaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah terkait untuk mempercepat pelaksanaan program hutan rakyat yang menjadi kunci sukses mengembangkan hutan adalah kelompok tani hutan atau petani. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program pengelolaan hutan rakyat adalah pengawasan, pendampingan, dan pemantauan masih rendah. Hal ini memengaruhi peranan penting mengingat bahwa segala bentuk pengelolaan yang dilakukan dalam hutan rakyat harus ada keberlanjutan

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada pihak UPT. KPHP Dolago Tanggunung yang telah membantu berjalannya penelitian, serta masyarakat yang terlibat pada kegiatan ini di 2 Desa (Petimbe dan Sigimpu)

Daftar Pustaka

Anggraini, D., Malik, A., & Harujanto, H. 2019. Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Rakyat Di Desa Mantikole. *Journal Warta Rimba*. 7 (3) : 94–99.

Asyari, M. A. H., & Dewi, R. K. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Social Forestry) (Studi Kasus Di Kelompok Tani Hutan Bual Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah). *Jurnal Manajemen Agribisnis*. 6 (2) : 42–47.

Cryf Sir Leyf Evan. 2018. Persepsi Dan Adaptasi Petani Hutan Akibat Perubahan Iklim “Studi Kasus : Di Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Tesis. Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Pascasarjana. Universitas Tadulako. Palu.

Fazriyas, Bambang, I., & Rezky, L. W. 2018. Analisis Kebutuhan Standar Kompetensi Sumberdaya Manusia Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Studi Kasus Pada Kphp Limau Unit VII Sarolangun). *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 2 (2) : 137-146.

Kamaluddin, A. K., & Tamrin, M. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Skema Perhutanan Sosial Di Area Kph Ternate-Tidore. *Techno : Jurnal Penelitian*. 08 (02) : 308-317. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33387/tk.v8i2.1350>

Kesatuan Pengelolaan Hutan. 2017. Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola (SPKS) KPH. Dolago Tanggunung. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pratama, A. R., Budi Yuwono, S., & Hilmanto, R. 2015. Pengelolaan Hutan Rakyat Oleh Kelompok Pemilik Hutan Rakyat Di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*. 3 (2) : 99–112. <https://doi.org/10.23960/jsl2399-112>

Rachmawati, N., & Susilawati. 2012. Upayamasyarakat Dalam mencegah Kebakaran Pada Saat Pembukaan Lahan Di Desa Gunung Sari Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. *Enviroscientiae*. 8 (1) : 35–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/es.v8i1.2066>

Silaen, Sofar & Widiyono. 2013. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. In Media. Jakarta.

Sukwika, T., Darusman, D., Kusmana, C., & Nurrochmat, D. R. 2018. Skenario Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan Di Kabupaten Bogor. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management). 8 (2) : 207–215. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.2.207-215>

Supangat, A. B., Indrawati, D. R., Wahyuningrum, N., Purwanto, &

Donie, S. 2020. Membangun Proses Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mikro Secara Partisipatif: Sebuah Pembelajaran. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 4 (1) : 17–36. <https://doi.org/10.20886/Jppdas.2020.4.1.17-36>.

Umar, S., Yodo, S., Alam, A. S., Aslam, D., & Livawanti, L. 2018. Post-Adoption Of The Candlenut Agroforestry In Central Sulawesi, Indonesia. Iop Conference Series: Earth And Environmental Science. 196 (1) : 0-10. <https://doi.org/10.1088/17551315/196/1/012029>